



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK
3. NHK : 490342

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.012.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1414 m²/115 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/55 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. Tanah Seluas 2150 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 752.500.000
4. Tanah Seluas 8000 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 326.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 226.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HADIAH Rp. 12.000.000
3. MOTOR, VESPA VX Tahun 1984, WARISAN Rp. 8.000.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 244.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 393.508.504****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 5.976.508.504****III. HUTANG****Rp. 810.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 5.166.508.504**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.